



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan disampaikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dengan regulasi ini diharapkan Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (baik secara kualitas maupun kuantitas) dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Disamping itu, Laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi terhadap kemampuan kinerja aparatur pemerintah khususnya BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan aktivitas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Palembang, Januari 2023

**KEPALA BPSDMD PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**



**Hj. TARBIYAH, S.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196410131984062001**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang, Gambaran Umum	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum OPD.....	4
1.4.1 Tugas Pokok.....	4
1.4.2 Fungsi.....	4
1.4.3 Struktur Organisasi.....	6
1.4.4 Sarana dan Prasarana.....	7
1.4.5 Komposisi Pegawai.....	8
1.5. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.1.1. Visi.....	10
2.1.2. Misi.....	10
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	11
2.1.4. Gambaran Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran.....	12
2.1.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Pengukuran Kinerja	17
3.1.1. Pengembangan Kompetensi Manajerial.....	17

3.1.2.	Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	18
3.1.3.	Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	18
3.1.4.	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	19
3.1.5.	Monitoring dan Evaluasi	20
3.2.	Capaian Kinerja Bidang	19
3.2.1.	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial.....	20
3.2.2.	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan...	21
3.2.3.	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	22
3.2.4.	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	23
3.2.5.	Monitoring dan Evaluasi	23
	3.2.5.1. Evaluasi Terhadap Penyelenggara	24
	3.2.5.2. Evaluasi Terhadap Widyaiswara/Tenaga Pengajar	24
3.3.	Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	25
3.3.1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial.....	26
3.3.2.	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi Teknis dan fungsional, kompetensi sociocultural dan kompetensi pemerintahan.....	27
3.4.	Akuntabilitas Keuangan.....	29
3.4.1.	Pendapatan.....	29
3.4.2.	Belanja	30
BAB IV	PENUTUP	34
4.1	Kesimpulan.....	34
4.2	Saran.....	34

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Sarana dan Prasarana Diklat Tahun 2022	7
1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	8
2.1 Indikator Kinerja Utama.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	16
3.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial	21
3.2 Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan.....	22
3.3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional...	22
3.4 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	23
3.5 Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU	26
3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022	30
3.7 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2022.....	30
3.8 Realisasi Program/Kegiatan BPSDMD Provinsi Sumsel	31

DAFTAR GRAFIK

3.1	Persentase Aparatur yang dinyatakan lulus/kompeten.....	27
3.2	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel Renstra Tahun 2019 - 2023
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2022
5. Print Out e-performance Triwulan IV Tahun 2022
6. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 31 Desember 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan aparatur sehingga menjadikan Aparatur yang memiliki kompetensi dan profesional.

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dari Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahunan dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023. Data-data yang diperoleh, berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja, dengan menggunakan informasi aktual yang diperoleh pada saat pra diklat, in diklat maupun pasca diklat. Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yakni : 1) Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dan 2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat aparatur.

Pagu Anggaran Belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 41.648.117.167 dengan realisasi sebesar Rp. 39.438.259.657 (94,69%). Terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.858.117.167 dengan realisasi sebesar Rp. 37.705.248.779 (94,60%) dan belanja modal sebesar Rp. 1.790.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.733.010.878,- (96,82%).

Untuk capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022, semuanya mencapai target, yang terdiri dari Indikator Pertama Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial, dengan target sebesar 88%, terealisasi sebesar 96% atau dengan capaian sebesar 110%. Sedangkan indikator kedua yaitu persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan dari target 65%, tercapai sebesar 65,6% atau dengan capaian sebesar 100,92%.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini maka dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatra Selatan, berperan sebagai Lembaga hulu yang sangat strategis dalam mempersiapkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber Daya Aparatur saat ini dituntun untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan revitalisasi birokrasi dilingkungan pemerintahan daerah yang mengarah kepada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dimana kerja pelayanan publik harus didukung dengan kapasitas dan kapabilitas aparatur yang mumpuni yang harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, skill, training dan keterampilan khusus. Ketersediaan aparatur pemeritahan yang profesional dan handal saat ini, menjadi suatu keharusan dan kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah harus mampu mempersiapkan diri memasuki era Pemerintahan yang kompetitif dan berdaya saing global yang diikuti dengan pertumbuhan nilai-nilai Demokratis ditingkat lokal. Upaya tersebut dilakukan agar desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan pada pedoman yang benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga dapat lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih

dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam mewujudkan good governance. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut perlu didukung dengan Sumber daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki Kompetensi optimal, mengingat Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan.

Proses pembinaan dimaksud didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional pada lembaga-lembaga Diklat.

Kebijakan utama yang tersirat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tersebut adalah mengangkat kompetensi sebagai fokus utama di dalam Sistem Diklat Aparatur. Dengan demikian, Diklat adalah sarana untuk mencapai kompetensi jabatan Aparatur, dan setiap jenis Diklat Aparatur yang diselenggarakan merupakan upaya untuk mencapai tingkat atau jenis kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022

2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang;
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan, dan
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4 GAMBARAN UMUM OPD

1.4.1 Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

1.4.2 Fungsi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut diatas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pengembangan sumber daya manusia provinsi :
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pengkoordinasian pengembangan kompetensi dilingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;

- e. Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur diprovinsi dan kabupaten/kota;
- f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negar/daerah;
- g. Pelaksanaan administrasi BPSDMD; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Fungsi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan bahan kebijaksanaan, analisa kebutuhan dan penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen pemerintahan, teknis, fungsional dan kepemimpinan serta melakukan perencanaan dan pengendalian Diklat;
- 2) Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten/kota;
- 3) Pelaksanaan pengajaran dan pelatihan;
- 4) Pelaksanaan seleksi/rekrutmen peserta diklat baik di bidang Diklat Manajemen Pemerintahan, teknis, fungsional maupun kepemimpinan;
- 5) Perumusan dan pengembangan desain kurikulum dan silabi diklat;
- 6) Penyusunan materi/bahan/modul diklat;
- 7) Pengembangan media dan alat bantu diklat;
- 8) Rekrutmen dan pembinaan widyaiswara/tenaga pengajar, peserta dan alumni Diklat Provinsi Sumatera Selatan;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam Rangka pendayagunaan alumni diklat dalam pengembangan karier;
- 10) Pelaksanaan kerjasama dengan PTN/PTS dan pihak lainnya di bidang kediklatan;

- 11) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi.

1.4.3 Struktur Organisasi :

Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016, adalah :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat :
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
 - Subbag Keuangan
 - Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan :
 - Subbid Sertifikasi Kompetensi
 - Subbid Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi
 - Subbid Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama
- 4) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti :
 - Subbid Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan
 - Subbid Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar
 - Subbid Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang
- 5) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial :
 - Subbid Manajerial Tingkat Tinggi
 - Subbid Manajerial Tingkat Menengah
 - Subbid Manajerial Tingkat Dasar
- 6) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional
 - Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
 - Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan

- Subbid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan
- 8) Pejabat Fungsional (Widyaiswara)

1.4.4 Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

No	Sarana dan Prasarana	Gedung/Ruangan		Kapasitas Keseluruhan
		Jumlah	Fasilitas	
1	Gedung Administrasi	1 unit (2 lantai)	AC, Soundsystem, Meubelair	-
2	Gedung Widyaiswara dan Perpustakaan	1 unit (2 lantai)	AC, Soundsystem, Meubelair	
3	a. Aula Putri Kembar Dadar	1 Unit	AC, Sound System Lengkap	200 Kursi
	b. Aula Hulu Balang	1 Unit	SDA	80 kursi
4	Ruang Belajar	7 kelas	7 Ruang AC	280 orang
5	Gedung Asesment Center	2 lantai	AC, Sound Sistem, Proyektor	
6	Asrama/ Penginapan	71 Kamar	AC/kipas angin	211 orang
	a. Asrama Putri Rambut Selako	10 kamar	2 orang per kamar	20 orang
	b. Asrama Mayang Sari	15 kamar	5 orang per kamar	75 orang
	c. Asrama Bagus Kuning	12 Kamar	3 orang per kamar	36 orang
	d. Asrama Batuapi	11 kamar	3 orang per kamar	33 orang
	e. Asrama Dapuntahyang	24 kamar	2 orang per kamar	48 orang
	f. Asrama Tuan Junjungan	11 kamar	6 kamar kapasitas @3 orang, 5 kamar @1 orang/kamar	23 orang
7	Paviliun/Mess	1 Unit	6 Kamar AC	12 orang
8	Ruang Makan	4 Unit	Meja dan Kursi	280 Orang
9	Klinik / Balai Pengobatan	1 Unit	Type 36 2 Orang T.Medis 2 Mobil Ambulan	2 Kamar Tidur
10	Masjid	1 Unit	1 Unit	300 Orang
11	Rumah Dinas	2 Unit	2 Unit	Type 36 dan 54
12	Gedung Koperasi	1 Unit	Waserba/Kantin	20

13	Ruang Perpustakaan	1 Unit	24 Meja dan Kursi	24
14	Lap.Tenis	1 Unit	2 band	-
15	Lapangan Badminton	1 unit	1 Band	-
16	Tennis Meja	2 Unit	2 Meja	-
17	Kendaraan Dinas : Roda 2 Roda 4	3 Unit 14 Unit		Minibus 12 Unit Ambulan 1 Unit Pick Up 1 Unit

1.4.5 Komposisi Pegawai

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai sesuai Jenjang Pendidikan per 31 Desember 2022

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
A	PNS	
1	S3	8
2	S2	42
3	S1	18
4	D3	-
5	SMU	13
6	SMP	-
7	SD	-
	JUMLAH	81

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2020 diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LKjIP tahun 2022

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi, Isu Strategis, Maksud dan Tujuan.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan Renstra 2019 - 2023, Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, metode pengukuran pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2022, Akuntabilitas Keuangan dan Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018, memperhatikan hasil analisis isu strategis, mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa bhakti 2019-2023, mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025, memperhatikan prioritas pembangunan nasional, merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah: ***SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA.***

2.1.2 Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas. Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, untuk itu BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan harus dapat mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu Tujuan ke-4 yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan** dan sasaran ke-11 yaitu **Maju Aparatur yang Profesional dan Berintegritas** (melalui meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah).

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar.

Untuk mewujudkan Tujuan Sumber Daya Aparatur yang kompeten tersebut, dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) Sasaran yaitu Meningkatkan Kompetensi Manajerial Aparatur, dan Meningkatkan Kompetensi Teknis Fungsional, Kompetensi Sosio-Cultural dan Kompetensi Pemerintahan ASN.

2.1.4 Gambaran Keterkaitan Misi, Tujuan dan sasaran

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPSDMD Prov. Sumsel

VISI : Sumsel Maju Untuk Semua			
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1. Meningkatkan kompetensi manajerial Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan program peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan 2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN 3. Evaluasi pasca diklat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan peningkatan kompetensi manajerial 2. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi ASN 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
	2. Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan ASN 2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN 3. Evaluasi pasca diklat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan peningkatan kompetensi teknis dan fungsional, sosiokultural dan kompetensi pemerintahan 2. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi ASN 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana kediklatan	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kediklatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat 2. Penguatan SOP pengelolaan Sarana dan Prasarana diklat
	2. Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan	Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kualitas tenaga kediklatan	Melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kualitas tenaga kediklatan seperti Training Officer Course, Management Of Training, Training Of Facilitator, Training Of Trainer, Workshop dan Focus Group Discussion
	3. Meningkatkan jumlah diklat yang terakreditasi	Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas akreditasi jenis diklat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat
	4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat	Terlaksananya kegiatan kediklatan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan diklat 2. Mengoptimalkan penggunaan metode, teknis dan strategi pembelajaran yang baik 3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi diklat

2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Indikator kinerja utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk periode 2019-2023 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Provinsi Sumatera Selatan yang kompeten	Meningkatkan kompetensi manajerial aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	$\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat manajerial/Struktural}}{\text{Jumlah Jabatan Struktural}} \times 100\%$	Penyelenggara diklat Bidang manajerial	Bidang Manajerial
		Meningkatkan kompetensi teknis, fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio, cultural dan kompetensi pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional, sosiokultural dan pemerintahan}}{\text{Jumlah ASN Provinsi Sumsel}} \times 100\%$	Data Pengembangan kompetensi pada Bidang Teknis Inti, Bidang Teknis Umum dan Fungsional, Bidang Sertifikasi dan Pengelolaan kelembagaan	Bidang Teknis Inti, Bidang Umum dan Fungsional, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan kelembagaan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan *cascading*, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kompetensi manajerial aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	88%
2	Meningkatkan kompetensi teknis, fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio, cultural dan kompetensi pemerintahan	65%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan secara simetris rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi yang diperoleh. Berdasarkan perencanaan kinerja Tahun 2022, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

3.1.1. Pengembangan Kompetensi Manajerial;

Pengembangan Kompetensi Manajerial adalah Pengembangan Kompetensi Manajemen Pemerintahan dan Kepemimpinan, yakni yang terkait dengan;

- a. Pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah (KDH/Wakil KDH, pimpinan/anggota DPRD, Camat);
- b. Pengembangan kompetensi bagi pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama (teknis, kepemimpinan);
- c. Pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan bagi jabatan administrasi dan kader PNS.

Pelatihan Kepemimpinan adalah Pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Pelatihan Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh BPSMD Provinsi Sumatera Selatan adalah Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.. Selain itu dalam rumpun diklat kepemimpinan juga dilaksanakan Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan untuk

memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II.

3.1.2. Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan Kelembagaan;

Sertifikasi kompetensi diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia serta penguatan kelembagaannya, yakni yang terkait dengan;

- a. Sertifikasi kompetensi yang harus melalui uji kompetensi untuk mengukur kompetensi aparatur yang dibandingkan dengan standarisasi kompetensi jabatan tertentu termasuk pengelolaan lembaga sertifikasi;
- b. Pengelolaan kelembagaan pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan fungsi kelembagaan dan pengembangan kompetensi bagi pengembang kompetensi (tenaga pengajar/ToT/MoT, Asessor, pengelolaan sarana pengembang/pembelajaran);
- c. Pengelolaan sumber belajar dan kerjasama dengan sasaran pembelajaran, perangkat pembelajaran serta pengembangan kerjasama.

3.1.3. Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;

Pengembangan Kompetensi Teknis Inti adalah pengembangan kompetensi yang berkaitan langsung dengan tugas fungsi jabatan, yakni yang terkait dengan:

- a. Urusan konkuren wajib pelayanan dasar (yang mencakup urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman trantibumlinmas dan

- sosial serta pilihan yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, ESDM, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
- b. Urusan konkuren wajib non pelayanan dasar (yang mencakup urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, admindukcapil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan);
 - c. Perangkat daerah penunjang yaitu sebagai pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (badan daerah dan sekretariat daerah).

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS, baik yang terkait dengan Urusan konkuren wajib pelayanan dasar, Urusan konkuren wajib non pelayanan ataupun perangkat daerah penunjang.

3.1.4. Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional:

Pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional adalah pengembangan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan pengembangan kompetensi teknis fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional, yakni yang terkait dengan :

- a. Pengembangan kompetensi umum dan wajib dimiliki oleh setiap jabatan (sistem pemerintahan, manajemen pembangunan, Wasbang);
- b. Pengembangan kompetensi pilihan yang harus dimiliki (sosial kultural) oleh setiap jabatan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing (kompetensi lain diluar jabatannya);
- c. Pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi yang akan atau sudah menduduki jabatan fungsional.

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing serta dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan. Diklat Fungsional yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan antara lain : Diklat fungsional keterampilan dan diklat fungsional keahlian, baik untuk pembentukan jabatan fungsional, alih jenjang maupun peningkatan kompetensi pejabat fungsional.

3.1.5. Monitoring dan Evaluasi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang dalam siklus manajemen kediklatan aparatur yang menjamin agar kegiatan diklat tetap sesuai dengan standar-standar yang berlaku serta pengendalian mutu secara komprehensif dan berkelanjutan.

3.2 Capaian Kinerja Pengembangan SDM

Pada tahun 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan secara total telah menyelenggarakan 49 angkatan diklat, meliputi pelatihan struktural/manajerial, Pelatihan Teknis dan Sertifikasi kompetensi dengan Total Peserta berjumlah 1.915 orang, seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tahun 2022

NO	NAMA PELATIHAN / BIDANG DIKLAT	JUMLAH PESERTA	SUMBER DANA
	BIDANG MANAJERIAL		
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	200 orang	APBD dan BLUD
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	154 orang	APBD dan BLUD
3	Pelatihan Dasar CPNS	1.087 orang	BLUD
	sub total	1.441 orang	
	BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI		

NO	NAMA PELATIHAN / BIDANG DIKLAT	JUMLAH PESERTA	SUMBER DANA
4	diklat penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	30 orang	APBD
5	Pelatihan TOC	6 orang	APBD
6	Pembekalan fungsional asesor	30 orang	APBD
7	Penyelenggaraan Asesment Center	299 orang	BLUD
	sub total	365 orang	
	BIDANG TEKNIS UMUM FUNGSIONAL		
8	Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian	40 orang	APBD
9	Diklat Fungsional Profesional Guru	40 orang	APBD
10	Diklat Fungsional Pranata Komputer	40 orang	APBD
11	Diklat Manajemen Kepala Sekolah	41 orang	BLUD
12	Diklat Bendahara BOS	37 orang	BLUD
	sub total	198 orang	
	BIDANG TEKNIS INTI		
13	Diklat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	30 orang	APBD
14	Diklat Peningkatan Kapasitas Desa	30 orang	APBD
15	Bimtek Pemberantasan Korupsi	30 orang	APBD
	sub total	90 orang	
	TOTAL	2.094 ORANG	APBD dan BLUD

Capaian kinerja pada masing-masing bidang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sumsel dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Bidang Pengembangan Kompetensi manajerial pada tahun 2022 telah melaksanakan 3 kegiatan kediklatan yaitu Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 6 angkatan dengan jumlah peserta 200 orang, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 4 angkatan dengan jumlah peserta 154 orang, Pelatihan Dasar CPNS

sebanyak 27 angkatan dengan jumlah peserta 1.087 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber
		Target	Realisasi	%	Dana
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	200	200	100	APBD dan BLUD
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	154	154	100	APBD dan BLUD
4	Pelatihan Dasar CPNS	1087	1.087	100	BLUD
	Total	1.441	1.441	100	

3.2.2 Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

Bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan pada tahun 2022 menyelenggarakan 6 kegiatan yang terdiri dari diklat penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dengan jumlah peserta 30 orang, Diklat pembekalan fungsional asesor dengan jumlah peserta 30 orang, Pelatihan TOC sebanyak 6 orang, penyelenggaraan Assesment Center dengan jumlah peserta sebanyak 299 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber
		Target	Realisasi	%	Dana
1	diklat penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	30 orang	40 orang	100	APBD
2	pembekalan fungsional asesor	30 orang	30 orang	100	APBD
3	Pelatihan TOC	6 orang	6 orang	100	APBD

4	Penyelenggaraan Akreditasi Diklat Barang Jasa	1 Dokumen	1 dokumen	100	BLUD
5	Penyelenggaraan Akreditasi Diklat Kearsipan	1 Dokumen	1 dokumen	100	BLUD
6	Penyelenggaraan Asesment Center	299 orang	299 orang	100	BLUD
	Total	365 orang dan 2 dokumen	365 orang dan 2 dokumen	100	APBD dan BLUD

3.2.3 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional pada tahun 2022 menyelenggarakan 5 kegiatan yaitu Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian dengan jumlah peserta 40 orang, Diklat Fungsional Profesional Guru dengan jumlah peserta 40 orang, Diklat Fungsional Pranata Komputer dengan jumlah peserta 40 orang, Diklat Manajemen Kepala Sekolah dengan jumlah peserta 41 orang dan Diklat Bendahara BOS dengan jumlah peserta 157 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Kegiatan Pengembangan Kompetensi teknis Umum dan Fungsional

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber dana
		Target	Realisasi	%	
1	Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian	40 orang	40 orang	100	APBD
2	Diklat Fungsional Profesional Guru	40 orang	40 orang	100	APBD
3	Diklat Fungsional Pranata Komputer	40 orang	40 orang	100	APBD
4	Diklat Manajemen Kepala Sekolah	40 orang	40 orang	100	BLUD
5	Diklat Bendahara BOS	37 orang	37 orang	100	BLUD
	Total	198 orang	198 orang	100	APBD dan BLUD

3.2.4 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

Bidang pengembangan kompetensi teknis inti pada tahun 2022 menyelenggarakan 3 kegiatan kediklatan yaitu Diklat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah peserta 30 orang, diklat peningkatan kapasitas desa dengan jumlah peserta 30 orang, Bimtek Pemberantasan korupsi dengan jumlah peserta 30 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber Dana
		Target	Realisasi	%	
1	Diklat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	30 orang	30 orang	100	APBD
2	Diklat Peningkatan Kapasitas Desa	30 orang	30 orang	100	APBD
3	Bimtek Pemberantasan Korupsi	30 orang	30 orang	100	APBD
	Total	90 orang	90 orang	100	APBD dan BLUD

3.2.5 Monitoring Evaluasi

Kegiatan monitoring evaluasi diklat dilakukan terhadap semua kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Evaluasi ini dilakukan terhadap pihak panitia penyelenggara ataupun tenaga pengajar/widyaiswara, dengan dilakukannya evaluasi penyelenggaraan diklat ini diharapkan akan menghasilkan data tentang kualitas penyelenggaraan diklat baik dari aspek program, widyaiswara, penyelenggara ataupun sarana dan prasarana penunjang. Hasil olah data monitoring evaluasi dibuat dalam laporan tersendiri yang dilaporkan oleh Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

3.2.5.1 Evaluasi Terhadap Penyelenggara

Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat diperoleh dari hasil pengisian form evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Diklat, baik diklat dibidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Inti. Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat dibuat tersendiri dalam bentuk laporan monitoring evaluasi kegiatan kediklatan. Adapun indikator yang dinilai oleh peserta terhadap penyelenggara adalah sebagai berikut :

- Efektivitas Penyelenggaraan
- Kesiapan, Ketersediaan dan Keberfungsian sarana dan Prasarana
- Kesesuaian Pelaksanaan Program dengan Rencana
- Ketersediaan dan Kelengkapan Bahan Diklat
- Pelayanan Terhadap Peserta Diklat
- Pelayanan Terhadap Widyaiswara
- Administrasi Diklat

3.2.5.2 Evaluasi Terhadap Widyaiswara/Tenaga Pengajar

Laporan evaluasi terhadap widyaiswara/tenaga pengajar diklat diperoleh dari hasil pengisian form evaluasi dan monitoring terhadap widyaiswara/tenaga pengajar yang mengampu/mengajar pada kegiatan Diklat dibidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Inti. Hasil evaluasi terhadap widyaiswara/tenaga pengajar dibuat tersendiri dalam laporan monitoring evaluasi kediklatan. Adapun indikator yang dinilai oleh peserta terhadap widyaiswara/tenaga pengajar adalah sebagai berikut:

- sistematika penyajian
- Kemampuan penyajian

- Ketepatan waktu dan kehadiran
- penggunaan metode dan sarana diklat
- sikap dan perilaku
- cara menjawab pertanyaan dari peserta
- penggunaan bahasa
- pemberian motivasi kepada peserta
- kerapian berpakaian
- kerjasama antar widyaiswara (dalam tim)

3.3 EVALUASI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 mempunyai 2 sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Tujuan, sasaran strategis dan IKU

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Provinsi Sumatera Selatan yang kompeten	Meningkatkan kompetensi manajerial aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial
		Meningkatkan kompetensi teknis, fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio, cultural dan kompetensi pemerintahan

3.3.1 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial

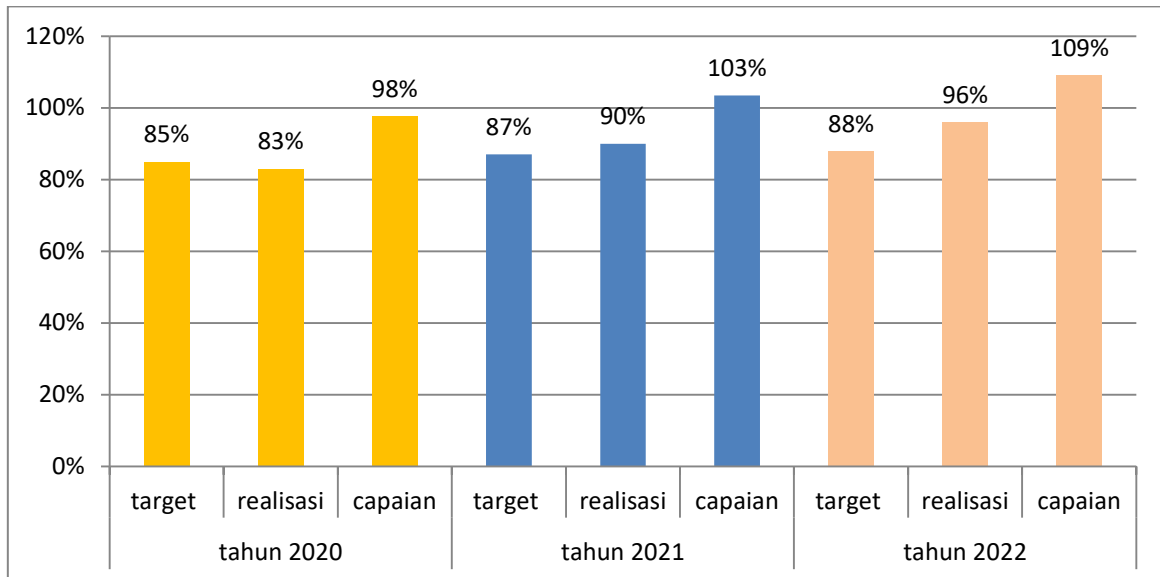
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial yang baik diukur dengan cara membandingkan jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat manajerial/struktural dengan Jumlah jabatan struktural Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dikalikan 100 persen. Indikator ini pencapaiannya didukung oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDMD Prov. Sumsel.

Pada tahun 2021, Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan berjumlah 1.152 orang dari total 1.279 jabatan baik eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga capaian indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial pada tahun 2021 telah mencapai 90%.

Pada tahun 2022, Bidang Pengembangan Kompetensi manajerial melaksanakan 2 Jenis Diklat Manajerial yaitu Pelatihan Kepemimpinan Administrator (6 Angkatan), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (4 Angkatan), dan dengan total peserta sebanyak 354 orang yang berasal baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Kabupaten/Kota di Dalam Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2022, dari total 354 orang peserta pelatihan kepemimpinan, baik kepemimpinan pengawas maupun administrator, peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 103 orang, sehingga Total Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan sampai dengan tahun 2022 berjumlah 1.255 orang dari total 1.303 jabatan atau 96%.

Jadi, Indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2022 dari target sebesar 88% terealisasi sebesar 96% atau dengan capaian sebesar 109 %.

Grafik 3.1
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial tahun 2020-2022



3.3.2 Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sociocultural dan kompetensi pemerintahan

Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sociocultural dan kompetensi pemerintahan yang baik diukur dengan cara membandingkan jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional, sosiokultural dan pemerintahan dengan Jumlah ASN Provinsi Sumatera Selatan dikalikan 100 persen. Indikator ini pencapaiannya didukung oleh Bidang Teknis Inti, Bidang Teknis Umum dan Fungsional, Bidang Sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembangaan. Indikator ini pencapaiannya didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

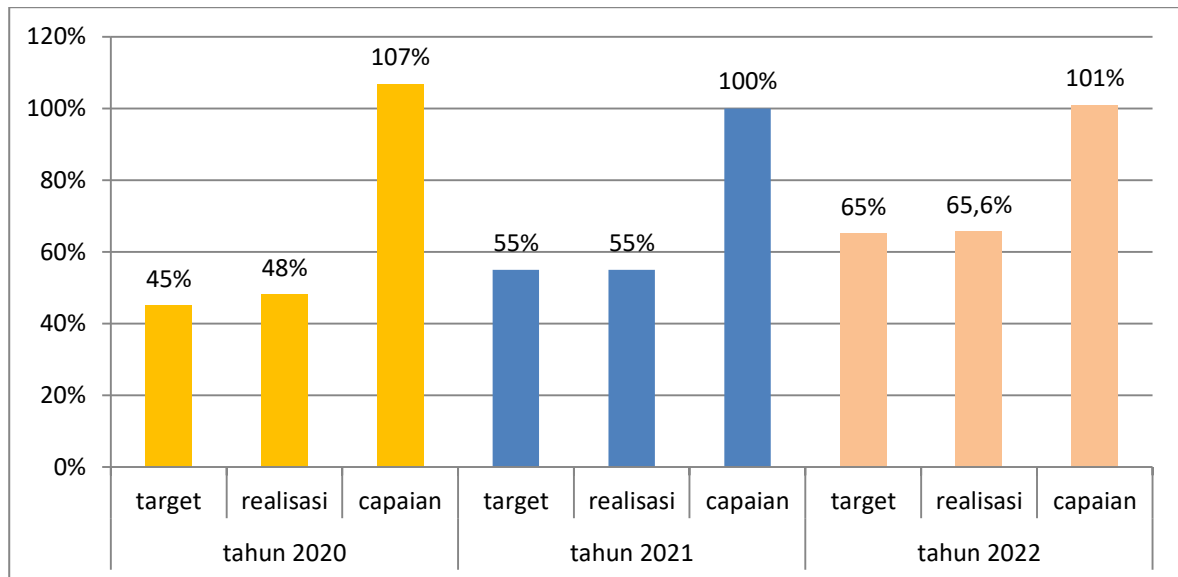
Untuk tahun 2021, target capaian indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sociocultural dan kompetensi pemerintahan adalah sebesar 55%. Untuk tahun 2021, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera

Selatan telah melaksanakan kegiatan diklat sebanyak 13 jenis kegiatan/diklat dengan jumlah peserta secara keseluruhan berjumlah 999 orang, dengan rincian diklat di Bidang Manajerial berjumlah 422 orang, diklat di bidang Teknis Umum dan Fungsional berjumlah 357 orang, bidang Sertifikasi dan kelembagaan berjumlah 110 orang dan Bidang Teknis Inti berjumlah 110 orang, sehingga jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sampai dengan tahun 2021 berjumlah 8.531 orang atau 55 % dari total jumlah ASN Pemerintah Provinsi Sumsel yang berjumlah 15.634 orang.

Pada tahun 2022, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan diklat kepada ASN Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 1.915 orang, dengan rincian Pelatihan bidang manajerial 1.441 orang, pelatihan bidang teknis inti 90 orang, pelatihan bidang sertifikasi kompetensi 365 orang dan bidang teknis umum fungsional berjumlah 198 orang., sehingga total ASN pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti pelatihan teknis dan fungsional berjumlah 10.446 orang dari total 15.634 orang.

Jadi capaian indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sociocultural dan kompetensi pemerintahan tahun 2022 dari target 65% tercapai sebesar 65,6% atau 101%.

Grafik 3.2
Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan



3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan pencapaian kinerja juga diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan. Adapun target dan realisasi baik dari aspek pendapatan maupun belanja BPSDMD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

3.4.1 Pendapatan

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dan pendapatan BLUD, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000	5.000.000	25%
2	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	17.248.621.167	17.023.762.227	98%
	Jumlah	17.268.621.167	17.028.762.227	98,6%

Pendapatan BPSDMD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2022, baik yang berasal dari BLUD maupun Retribusi Jasa Usaha, dari target sebesar Rp. 17.268.621.167,- tercapai sebesar Rp. 17.028.762.227 atau sebesar 98,6%.

3.4.2 Belanja

Jumlah Total Pagu Anggaran Belanja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 baik yang dari APBD maupun BLUD yaitu sebesar Rp. 41.648.117.167 dengan realisasi sebesar Rp. 39.438.259.657 (94,69 %). Dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)
1	Belanja Operasi	39.858.117.167	37.705.248.779	94,60	100
	- Belanja Pegawai	15.113.966.000	13.905.916.910	92,01	100
	- Belanja Barang dan Jasa	24.744.151.167	23.799.331.869	96,18	100
2	Belanja Modal	1.790.000.000	1.733.010.878	96,82	100
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000.000	795.118.278	99,39	100
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	900.000.000	848.593.100	94,29	100
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000	89.299.500	99,22	100
		41.648.117.167	39.438.259.657	94,69	100

Adapun rincian realisasi program/kegiatan pada Belanja Langsung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Realisasi Program/kegiatan BPSDMD Prov. Sumsel tahun 2022

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				Realisasi (Rp)	%	%
1	2	3	6	5	11	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		41.648.117.167	39.438.259.657	94,69	100,00
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	93.774.000	93,78	100,00
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	45.454.000	90,91	100,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	48.320.000	96,64	100,00
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.094.576.000	14.815.556.910	92,05	100,00
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.027.926.000	13.832.356.910	92,04	100,00
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	959.010.000	888.040.000	92,60	100,00
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.640.000	95.160.000	88,41	100,00
	iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.160.000	44.025.000	69,70	100,00
	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.160.000	44.025.000	69,70	100,00
	iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	930.375.000	920.392.182	98,92	100,00

	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	115.000.000	114.394.100	99,47	100,00
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	74.988.125	99,98	100,00
	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.000.000	61.304.000	95,79	100,00
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	8.000.000	80,00	100,00
	11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00
	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496.375.000	493.367.457	99,39	100,00
	13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	120.000.000	118.338.500	98,62	100,00
	v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	900.000.000	848.593.100	94,29	100,00
	14	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000.000	848.593.100	94,29	100,00
	vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.734.800.000	1.567.590.018	90,37	100,00
	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.119.600.000	958.590.018	85,62	100,00
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000.000	594.000.000	99,00	100,00
	vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000.000	592.400.400	98,73	100,00
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.000.000	185.000.000	100,00	100,00
	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	67.500.000	90,00	100,00

	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	199.989.400	99,99	100,00
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.000.000	139.911.000	99,94	100,00
	viii	Peningkatan Pelayanan BLUD	17.248.621.167	17.023.762.227	98,70	100,00
	21	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	17.248.621.167	17.023.762.227	98,70	100,00
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		3.976.785.000	3.532.165.820	88,82	100,00
	i	Pengembangan Kompetensi Teknis	870.000.000	827.775.217	95,14	100,00
	22	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	750.000.000	707.812.000	94,37	100,00
	23	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	120.000.000	119.963.217	99,97	100,00
	ii	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.106.785.000	2.704.390.603	87,05	100,00

	24	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	187.700.000	166.390.000	88,65	100,00
	25	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	200.000.000	187.496.861	93,75	100,00
	26	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	112.300.000	84.886.000	75,59	100,00
	27	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.606.785.000	2.265.617.742	86,91	100,00
		Jumlah : 27 kegiatan	41.648.117.167	39.438.259.657	94,69	100,00

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat mencapai target kinerja bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Hal ini merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta komitmen bersama semua pihak yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta menjamin keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Sumatera Selatan.

4.2 SARAN

Untuk mengoptimalkan kinerja diklat aparatur ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian *outcomes* dan *benefit*, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis diklat baru serta disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi;
- b. Mengembangkan sistem informasi kediklatan berbasis web, guna untuk menyediakan informasi/basis data kediklatan yang lengkap, akurat dan *real time*.

- c. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan diklat baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarananya;
- d. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan;
- e. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dengan pengelola kediklatan baik dengan instansi pembina diklat (pusat), provinsi maupun kabupaten/kota serta;
- f. Membuka jejaring yang lebih luas dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga.